



DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- | | | | |
|---|------------------|---|--|
| 1 | Perangkat Daerah | : | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur |
| 2 | Tugas | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan |
| 3 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.2. Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kesehatan yang telah ditetapkan.3. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan.4. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.5. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik tenaga kesehatan.6. Mengembangkan sumber daya kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, sarana prasarana, dan informasi kesehatan.7. Berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah. |

4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur :

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN
T1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Definisi Operasional : Rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir (atau pada usia tertentu), dengan asumsi bahwa pola mortalitas (kematian) saat ini tetap berlaku sepanjang hidup orang tersebut. Rumus /Formulasi Perhitungan : UHH dihitung dengan menggunakan model statistik oleh BPS dalam satu tahun Sumber Data : BPS Provinsi / Nasional Tipe Indikator : Positif / Negatif
S1	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Provinsi dan Kab/Kota	1 Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi	Nilai	Definisi Operasional : Ukuran komposit yang menggambarkan capaian rata-rata pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada seluruh urusan wajib pelayanan dasar oleh pemerintah provinsi dalam satu tahun. Rumus /Formulasi Perhitungan : Total capaian SPM dibagi dengan Jumlah total indikator SPM yang wajib dilaporkan (Permenkes No. 6 Tahun 2024 tentang standar teknis pemenuhan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN
				SPM Kesehatan) Sumber Data : 1 Laporan Capaian Kinerja SPM 2 Dokumen Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 3 Aplikasi Pemantauan SPM (Kementerian Dalam Negeri) Tipe Indikator : Positif
		2 Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab/Kota	Nilai	Definisi Operasional: Ukuran komposit yang menunjukkan rata-rata capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal pada urusan wajib pelayanan dasar sesuai ketentuan perundang-undangan. Rumus /Formulasi Perhitungan : ➤ Rata-rata persentase capaian target SPM dari seluruh indikator urusan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. ➤ Capaian SPM (per indikator pelayanan dasar) di bagi jumlah total indikator SPM yang berlaku untuk kabupaten/kota (Permenkes No. 6 Tahun 2024 tentang standar teknis pemenuhan SPM Kesehatan) Sumber Data : 1 Laporan realisasi capaian indikator SPM kabupaten/kota

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN
				2 Aplikasi Pemantauan SPM (Ditjen Bina Pembangunan kabupaten/kota Daerah – Kemendagri) 3 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota Tipe Indikator : Positif / Negatif
S2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik provinsi	Nilai	Definisi Operasional : Nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah provinsi, berdasarkan penilaian masyarakat pengguna layanan dalam periode tertentu. Rumus /Formulasi Perhitungan : Jumlah skor total unsur pelayanan yang dinilai dibagi jumlah unsur pelayanan Sumber Data : 1. Kuesioner pengguna layanan fasilitas kesehatan milik provinsi 2. Rekap hasil survei IKM oleh tim independen mutu RS/lab/UPTD 3. Laporan evaluasi pelayanan publik Tipe Indikator :

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN
				Positif / Negatif
		4 Persentase Rumah Sakit milik Pemerintah dengan SDMK sesuai standar	Persen	Definisi Operasional : Presentase rumah sakit pemerintah yang memiliki jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (4 spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang) Rumus /Formulasi Perhitungan : Jumlah RS pemerintah dengan SDMK sesuai standar dibagi total rumah sakit milik pemerintah dikali 100% Sumber Data : 1 Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) – Kemenkes RI 2 SIRS Online (Sistem Informasi Rumah Sakit) 3 Registrasi Tenaga Kesehatan (KTKI/MTKI) 4 Hasil akreditasi rumah sakit Tipe Indikator : Positif / Negatif

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN
		5 Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persen	Definisi Operasional : Proporsi Puskesmas yang memiliki jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan total seluruh Puskesmas yang ada dalam wilayah kabupaten/kota (9 jenis tenaga kesehatan) Rumus /Formulasi Perhitungan : Jumlah Puskesmas dengan SDMK sesuai standar dibagi total Puskesmas dikali 100% Sumber Data : 1. Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) – Kemenkes RI 2. Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) 3. Laporan SDMK Dinas Kesehatan Kab/Kota 4. Data Registrasi Nakes (KTKI/MTKI) Tipe Indikator : -ositif / Negatif
		6 Rasio Kecukupan Tempat Tidur Rumah Sakit	Persen	Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah tempat tidur rawat inap yang tersedia di rumah sakit dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang digunakan untuk menggambarkan tempat tidur di fasyankes per 1.000 penduduk.

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN
				Rumus /Formulasi Perhitungan : Jumlah tempat tidur rumah sakit dibagi jumlah penduduk dikali 1000 Sumber Data : 1. SIRS Online (Sistem Informasi Rumah Sakit – Kemenkes) 2. Data RS dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Data penduduk dari BPS 4. Data Dinas Kependudukan dan Capil Tipe Indikator : Positif / Negatif
S3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	7 Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Persen	Definisi Operasional : Skor penilaian yang diberikan oleh Inspektorat terhadap tingkat pencapaian dan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Kesehatan, yang mencerminkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal Rumus /Formulasi Perhitungan : Nilai Akuntabilitas sama dengan bobot dikali skor komponen Sumber Data : 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN
				2 Evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB (melalui Inspektorat Jenderal atau APIP Provinsi) 3 Dokumen RENSTRA dan Perjanjian Kinerja 4 Hasil reviu dokumen kinerja oleh Inspektorat Daerah Tipe Indikator : Positif / Negatif

Samarinda, 11 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan,



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ.,M.Kes.,MARS

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19710720 200604 1 002